

PENGARUH USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Heri Enjang Syahputra, SE.,M.Si

Dosen Akuntansi Universitas Sari Mutiara Indonesia
Jl. Kapten Muslim No. 79 Medan Provinsi Sumatera Utara
herienjangsyahputra@yahoo.com*

Renika Hasibuan

Dosen Akuntansi Universitas Sari Mutiara Indonesia
Jl. Kapten Muslim No. 79 Medan Provinsi Sumatera Utara
renikahasibuan@sari-mutiara.ac.id

ABSTRAK

Pengaruh Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM), Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Nonformal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menguji dan menganalisis studi empiris tentang pengaruh UMKM di kecamatan raya kabupaten simalungun dan pentingnya keberadaan UMKM apakah bisa dilegasikan menjadi upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun. (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan nonformal dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan jumlah populasi sebesar 120 UMKM dan sampel sebesar 42 responden dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS 21. Sedangkan uji kesesuaian dilakukan dengan menggunakan R-Square, Uji Parsial dan Uji Simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai koefisien regresi pada variabel UMKM (-0,387) artinya jika UMKM bertambah 1 unit, sedangkan variabel Penyerapan tenaga Kerja dan Pendidikan Non Formal tetap maka Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,387%. (2) Nilai koefisien regresi pada variabel Penyerapan Tenaga Kerja (-0,173) artinya jika variabel Penyerapan Tenaga Kerja bertambah 1 orang, sedangkan variabel UMKM dan Pendidikan Non Formal tetap, maka Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,173%. (3) Nilai koefisien regresi pada variabel Tingkat Pendidikan Non Formal (0,038) artinya jika variabel Tingkat Pendidikan Nonformal bertambah, sedangkan variabel UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja tetap maka Kemiskinan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,038%.

Kata Kunci: UMKM, Penyerapan Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Nonformal, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah yang tercatat memiliki jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data (BPS, 2013) 54% penduduk di Kabupaten Simalungun bermata pencaharian bercocok tanam.

Namun pekerjaan ini belum dapat mensejahterahkan rakyat karena penghasilan dari bercocok tanam belum mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Disamping itu, mahalnnya harga-harga bahan baku untuk bercocok tanam seperti; pupuk, bibit dan lain sebagainya menyebabkan masyarakat semakin tidak mampu untuk terus bercocok tanam. Berikut ini merupakan grafik Kemiskinan di Kabupaten Simalungun tercatat dari tahun 2011 s/d tahun 2016.

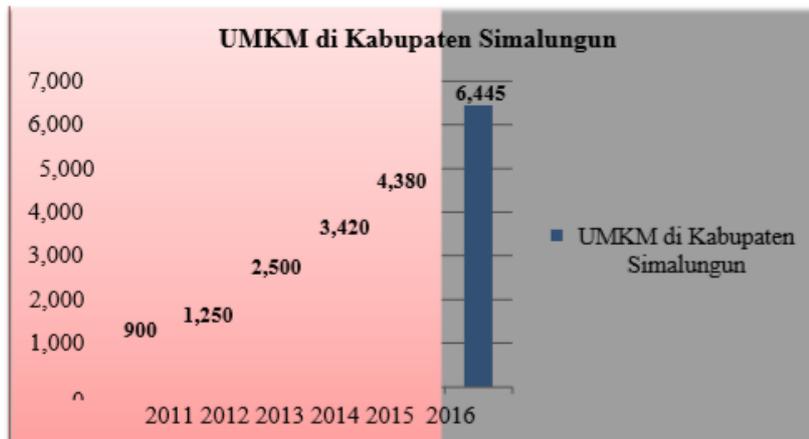
Grafik 1. Grafik Kemiskinan di Kabupaten Simalungun Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Dalam (000)



Sumber : Data BPS Kabupaten Simalungun

Berdasarkan grafik Kemiskinan di Kabupaten Simalungun terlihat pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 kemiskinan meningkat. Penyebab kemiskinan adalah karena minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Tidak hanya itu, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun (newsanalisisdaily, 2017 dalam topik Tiga Penyebab Kemiskinan). Di Indonesia pentingnya UMKM sering dikaitkan dengan masalah- masalah ekonomi dan sosial seperti tingkat penduduk miskin yang tinggi dan jumlah pengangguran yang besar terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja dapat mengurangi jumlah pengangguran (Nurjanah, 2015).

Grafik 2. Grafik UMKM di Kabupaten Simalungun Tahun 2011 s/d tahun 2016



Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Simalungun

Salah satu keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan adanya berbagai macam program pemberdayaan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu usaha yang sinergi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain sangat dibutuhkan untuk efektivitas program pemberdayaan. Oleh karena itu, bagi sebagian orang yang memiliki potensi dari segi kreativitas, inovatif, teliti, ulet, dan memiliki kemampuan kerja yang tinggi, justru hal tersebut yang menarik untuk mendirikan UMKM. Hal tersebut dikarenakan merasa lebih bebas, tidak terkekang untuk mengambil keputusan, tidak memikirkan resiko yang tinggi, dan mereka menyadari bahwa suatu usaha besar harus dimulai dari usaha kecil. Selain itu, kemampuannya lebih baik dan dinamis dalam menyesuaikan diri terhadap keadaan pasar yang mudah berubah dibandingkan usaha besar.

Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi dalam struktur perekonomian nasional. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaannya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat, karena keberadaannya mampu banyak menyediakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, keberadaannya juga masih banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal (Prasetyo 2008).

Berdasarkan latarbelakang di atas Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah UMKM berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun, Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun, Apakah tingkat pendidikan nonformal dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun?.

Sehingga disimpulkan tujuan penelitian ini adalah: Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh UMKM dan pentingnya keberadaan UMKM sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun, Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun, Untuk menguji dan menganalisis apakah tingkat pendidikan nonformal berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: **Bagi Pemerintah**, untuk mendukung keberadaan UMKM agar dapat menyerap Tenaga Kerja dan juga didukung dengan berbagai pendidikan nonformal dari pemerintah. Sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan, **Bagi pelaku UMKM**, dapat memberikan pertimbangan tentang keberadaan para pelaku usaha sebagai salah

satu pengentasan kemiskinan dan menjadi penggerak perekonomian di Kabupaten Simalungun, **Bagi pihak lain**, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih lanjut mengenai pentingnya keberadaan UMKM, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pendidikan nonformal dalam mengentaskan kemiskinan.

KERANGKA TEORITIS

Kesejahteraan dan Kemiskinan

Dalam ilmu ekonomi mikro klasik, pendekatan welfarist dikenal sebagai kesejahteraan atau "utilitas", sering digunakan dalam perhitungan perilaku dan kesejahteraan individu. Dalam pandangan ilmu ekonomi mikro klasik, seorang individu diasumsikan bersifat rasional, sehingga mereka akan memaksimalkan utilitasnya untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan modal awal atau sumber daya yang ia miliki, seperti waktu, tanah, fisik, keuangan, dan skill. Berdasarkan modal awal ini (initial endowment) individu akan membuat pilihan di antara produksi dan konsumsi mereka sendiri, dengan berbagai batasan atau kendala yang ada serta asumsi persaingan sempurna seperti pasar yang kompetitif, dan informasi yang sempurna (Maipita, 2014). Berbeda dengan pendekatan welfarist, pendekatan nonwelfarist memiliki dua pendekatan utama yaitu pendekatan kebutuhan atau yang disebut juga dengan functionings approach atau dimensions approach dan pendekatan kemampuan (capabilities). Pendekatan functionings yang dimaksud adalah menitikberatkan pada capaian beberapa aspek multidimensi dasar, seperti pemenuhan gizi, kesehatan, keamanan, harapan hidup dan lainnya (Maipita 2014).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kesejahteraan dalam konsep kemiskinan biasanya dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *welfarist* dan *nonwelfarist* (Revallion,1994) dalam (Maipita, 2014). Pendekatan *welfarist* menitikberatkan pada perbandingan kesejahteraan ekonomi, yang juga disebut sebagai standar hidup atau pendapatan. Dalam ilmu ekonomi mikro klasik, pendekatan *welfarist* dikenal sebagai kesejahteraan atau "utilitas", sering digunakan dalam perhitungan perilaku dan kesejahteraan individu. Dalam pandangan ilmu ekonomi mikro klasik, seorang individu diasumsikan bersifat rasional, sehingga mereka akan memaksimalkan utilitasnya untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan modal awal atau sumber daya yang ia miliki, seperti waktu, tanah, fisik, keuangan, dan *skill*. Berdasarkan modal awal ini (*initial endowment*) individu akan membuat pilihan di antara produksi dan konsumsi mereka sendiri, dengan berbagai batasan atau kendala yang ada serta asumsi persaingan sempurna seperti pasar yang kompetitif, dan informasi yang sempurna (Maipita, 2014).

Dasar dari pendekatan *welfarist* terhadap kemiskinan adalah adanya pernyataan bahwa catatan yang baik harus didapat dari informasi yang diungkapkan langsung oleh perilaku individu ketika menilai kemiskinan. Dengan kata lain, penilaian terhadap kesejahteraan seseorang harus konsisten dengan urutan preferensi yang dinyatakan oleh orang tersebut. Maka disinilah letak permasalahannya, bahwa dalam pendekatan *welfarist* murni, mengukur tingkat utilitas seseorang itu sangat sulit, karena preferensi antar individu sangatlah heterogen, tergantung dari banyak hal, seperti karakteristik individu, kebutuhan dan kemampuan menikmati, komposisi rumah tangga, dan tingkat harga. Seseorang dapat saja dikatakan miskin karena standar utilitasnya yang tinggi dan sulit untuk dicapai meskipun ia memiliki pendapatan yang tinggi, sementara orang lain dapat saja dikatakan tidak miskin karena utilitasnya yang rendah dan dengan mudah dapat ia capai meskipun tingkat pendapatannya rendah. Dengan kata lain, orang yang pertama tidak miskin secara materi namun merasa tidak puas, sedangkan orang kedua miskin secara materi tetapi merasa cukup dan puas. Kondisi ini yang disebut Sen (1983) dalam (Maipita, 2014) : "mengapa harus si kaya yang suka mengeluh dinilai lebih miskin daripada si miskin yang mudah merasa puas?". Untuk penyederhanaan, meskipun tidak sempurna, pendekatan *welfarist*, menggunakan tingkat pendapatan dan konsumsi dalam mengukur kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatan ini mencoba memetakan konsep kebutuhan yang multidimensional menjadi satu dimensi saja.

Berbeda dengan pendekatan *welfarist*, pendekatan *nonwelfarist* memiliki dua pendekatan utama yaitu pendekatan kebutuhan atau yang disebut juga dengan *functionings approach* atau *dimensions approach* dan pendekatan kemampuan (*capabilities*). Pendekatan *functionings* yang dimaksud adalah menitikberatkan pada capaian beberapa aspek multidimensi dasar, seperti pemenuhan gizi, kesehatan, keamanan, harapan hidup dan lainnya (Maipita 2014). Pendekatan *functionings* menitikberatkan pada “kemampuan” seseorang untuk berfungsi dengan baik di masyarakat. Seseorang bisa jadi mampu untuk memiliki mobil, rumah yang bagus, aktif di masyarakat dan lainnya meskipun ia tidak melakukannya. Jadi sekali lagi, bahwa pendekatan ini menitikberatkan pada kemampuan seseorang untuk memperoleh berbagai dimensi yang ada, bukan pada hasil yang dicapai dari dimensi tersebut. Dengan kata lain, seseorang tidak mencapai beberapa dimensi yang telah ditetapkan, asalkan ia mampu bila ia menginginkan atau memilihnya (Maipita 2014).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Mamman (2015) mengatakan Konsep spritualitas dalam UMKM harus disertakan dalam artikulasi pembuatan dan implementasi kebijakan. Selain itu, program tersebut harus disertakan dalam program pengembangan UMKM dan Wirausaha yang disediakan oleh badan-badan negara dan pembangunan. Ini dapat membantu untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. UMKM juga telah menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja yang saat itu pengangguran atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, UMKM mampu bertahan di tengah guncangan krisis moneter yang melambungkan harga barang-barang kebutuhan rumah tangga pada masa itu. UMKM jelas memegang peranan vital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di Indonesia sendiri, definisi dan karakteristik UMKM diatur dalam berbagai perspektif menurut (Nurjanah, 2015) yaitu: (1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyebutkan bahwa : Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan aset s/d Rp 50 Juta dan Omset maksimum 300 juta per tahun. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan aset > 50 Juta-500 Juta dan omset Rp 300 juta-Rp 2,5 Milyar per tahun. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan aset > Rp 500 Juta-Rp 10 Milyar dan omset > Rp 2,5 Milyar-Rp 50 Milyar per tahun; (2) Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria usaha adalah: Usaha Mikro, memiliki 1-4 orang tenaga kerja, Usaha Kecil, memiliki 5-19 orang tenaga kerja, Usaha Menengah, memiliki 20-99 orang tenaga kerja, Usaha Besar, memiliki di atas 99 orang tenaga kerja; (3) Menurut Bank Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut : Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta, Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta, Suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai total asset maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati. Omset tahunan lebih besar dari Rp. 1 milyar. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 70 juta ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia; (4) Menurut Bank Dunia, kriteria usaha mikro kecil dan menengah adalah: Usaha Mikro, memiliki pekerja < 10 orang, dengan jumlah aset < \$100.000 atau omset < \$100.000 pertahun, Usaha Kecil, memiliki pekerja < 50 orang, dengan jumlah aset < \$3 juta atau omset < \$3 juta pertahun, Usaha Menengah, memiliki pekerja < 300 orang, dengan jumlah aset < \$15 juta atau omset < \$15 juta pertahun. UMKM telah memberi titik terang, perhatian dan strategi bagi pengentasan kemiskinan dan sekarang menjadi isu universal terutama di kalangan tahapan ekonomi

Syahputra & Hasibuan/Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),
<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/karmapsi>

berkembang. Selain itu, pengembangan usaha kecil dan menengah telah digambarkan sebagai mekanisme yang penting dari suatu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Hamid dan Bello, 2008) dalam (Sokoto, 2013).

UMKM juga meningkatkan kompetisi dan kewirausahaan. Dengan demikian kehadiran UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas. UKM umumnya lebih produktif daripada perusahaan-perusahaan besar, tetapi kegagalan kelembagaan dan pasar keuangan menghambat perkembangan mereka. UMKM berekspansi dalam upaya meningkatkan pekerjaan yang lebih dari perusahaan besar karena mereka memiliki tenaga kerja yang lebih intensif. Dengan demikian, setiap upaya untuk mengembangkan UMKM akan sangat membantu dalam strategi pengentasan kemiskinan dan dalam pengembangan ekonomi. (Sokoto, 2013).

Selain itu kapasitas penciptaan lapangan kerja dari UMKM tersebut juga telah menciptakan dua untai argumen. Untai pertama dari argumen adalah orang-orang seperti (Owualah, 1999; Nnanna, tahun 2001; Komisi promosi investasi Nigeria, 2003) yang berpandangan bahwa perusahaan kecil lebih intensif menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan yang besar. Dengan demikian, dalam persepsi ini kedua hal diatas berpendapat bahwa kebijakan untuk mempromosikan pertumbuhan UMKM harus menjadi sebuah paket yang penting dalam setiap langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan terutama dalam mengembangkan ekonomi campuran. Walaupun demikian, alur kedua literatur memegang pandangan yang bertentangan. Menurut Para pendukung dari perusahaan-perusahaan besar menurut (Kayanula, dan Quartey, 2000; Beck, et al, 2005) dalam (Sokoto, 2013).

Sokoto (2013) menyatakan UMKM menghasilkan lebih banyak pekerja dibandingkan perusahaan besar, UMKM juga mempromosikan pemanfaatan sumber daya lokal dan membantu dalam transformasi masyarakat biasa lebih dari perusahaan besar.

Faktor-faktor yang Menghambat Perkembangan UMKM

Perkembangan UMKM di Indonesia belum maksimal, ada 2 faktor penghambat berkembangnya UMKM di Indonesia yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor Internal Faktor internal yang menjadi penghambat berkembangnya UMKM meliputi: **Kurangnya Permodalan**, Faktor permodalan merupakan faktor utama yang sangat diperlukan disuatu UMKM, pada suatu usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup biasanya hanya mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sangat sulit diperoleh dikarenakan persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh suatu bank atau lembaga keuangan lainnya tidak dapat tepenuhi. Indonesia sudah memiliki beberapa lembaga keuangan, bank perbankan dan non bank yang dapat membantu permasalahan ini. Untuk skala mikro, dikenal dengan lembaga keuangan mikro dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk lembaga keuangan non perbankan, terdapat lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP), untuk tingkat nasional PT. Permodalan Nasional Madan (Persero) yang melakukan pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro. Selain itu, terhadap perum pegadaian dengan menawarkan jasa bantuan keuangan untuk pengusaha mikro kecil menengah dengan proses yang relatif sederhana dan cepat. Tetapi tetap saja kemampuan keuangan lembaga-lembaga itu tidak sesuai dengan jumlah pengusaha skala kecil menengah (Wahyuni dkk, 2005). Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM pada usaha kecil baik dari pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat mempengaruhi manajemen pengelolaan usahanya dan hal ini yang membuat usaha tersebut sangat sulit untuk menghadapi atau mengikuti perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang akan dihasilkan. *Marita Hovers* dari PUM-sebuah lembaga untuk pendamping Small and Medium Enterprises (SME) atau sama dengan UMKM Belanda pernah mengidentifikasi, UMKM di Kabupaten Simalungun masih belum menerapkan manajemen yang memadai. Sebenarnya potensi perkembangannya cukup besar, namun karena tidak adanya manajemen yang baik akhirnya perkembangan usahanya cenderung stagnan. Stagnasi UMKM ini juga dipicu pengolahan yang berorientasi provit, mereka cenderung untuk bertahan dengan kondisi yang sudah ada.

Lemahnya Jaringan Usaha, Usaha kecil pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas. Oleh karena itu produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan kualitasnya yang sangat kurang baik. Sangat berbeda dengan usaha besar yang mempunyai jaringan usaha yang relatif besar dan penggunaan teknologi yang baik sehingga menghasilkan kualitas produk yang baik pula. Dan barang hasil produksi besar tersebut bisa di promosikan secara Internasional. Aspek lain yang membuat jaringan usaha dan akses pasar menjadi terbatas sekali, yaitu UMKM dihadapkan pada persoalan *cost of production* yang tinggi. Tingginya *cost of production* ini juga turut dipengaruhi oleh mahalannya bahan baku, tingginya *cost of transportation*, banyaknya pungutan liar yang mengatasmakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta retribusi lain yang irrasional dan tumpang tindih. Tingginya cost ini membuat produk UMKM kalah bersaing dengan produk-produk impor yang beredar bebas di pasar.

Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat berkembangnya UMKM meliputi; (1) Iklim Usaha Belum Kondusif, Iklim usaha yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi (Tambunan, 2009), (2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Implikasi Otonomi Daerah. Ketentuan tentang pengurusan izin usaha industri dan perdagangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Perdagangan (SIUP) yang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha perdagangannya. Selain itu, ada juga keputusan Menteri Perindag No. 225/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang dan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan sesuai dengan surat Edaran Sekjen No. 771/SJ/SJ/9/1997 ditetapkan bahwa setiap perusahaan yang mengurus SIUP baik kecil, menengah dan besar berkewajiban membayar biaya administrasi dan uang jaminan adalah 0 rupiah (nihil). Artinya, perizinan tidak dikenakan biaya (Wahyuni dkk, 2005). (4) Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Dalam memanfaatkan pasar global, UMKM kita bisa belajar ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Ketiga negara dengan akses pemasaran yang tidak tertembus UMKM ini juga sangat dipengaruhi lemahnya penguasaan Teknologi Informasi (TI) oleh pelaku UMKM (Wahyuni dkk, 2005).

Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (2008) dan sesuai dengan yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Todaro dalam Arum (2016) menyatakan Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa atau suatu kondisi ketersedianya lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.

Ali & Abdel (2013) menyatakan Penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak karena adanya peluang usaha. Pemerintah setempat mendorong sektor-sektor usaha kecil untuk membuka lapangan pekerjaan demi terciptanya komoditas-komoditas baru untuk perbaikan ekonomi global. Nidar (2012) menyatakan jika terjadi penyerapan tenaga kerja sudah tentu pengurangan kemiskinan dapat terjadi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Penyerapan tenaga kerja disini adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga Syahputra & Hasibuan/Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),
<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/karmapsi>

kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Jumlah unit usaha berhubungan erat dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Di mana banyaknya jumlah unit usaha yang tersedia, maka secara langsung akan menambah jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu industri. Mankiw dalam Arum (2016) menyatakan Permintaan tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang diminta di pasar tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah besarnya tenaga kerja yang ditawarkan oleh para pencari kerja di pasar tenaga kerja. Hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja disebut pasar kerja.

Tingkat Pendidikan

Keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya ada pada dunia manusia, dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia, tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada, *human life is just matter of education* (Suparlan Suhartono, 2008 dalam Nugroho 2015). Keberadaan kegiatan mendidik tersebut tidak hanya menembus dimensi waktu akan tetapi juga menembus dimensi tempat, dalam arti pendidikan telah berlangsung di segala waktu dan tempat. Oleh karenanya, kegiatan pendidikan dapat dikatakan bersifat fundamental, universal, dan fenomenal. Fundamentalitas pendidikan ini dapat ditentukan dari kedudukan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dan penting dalam meningkatkan segenap potensi anak menjadi sosok kekuatan sumberdaya manusia (*human resources*) yang berkualitas bagi suatu bangsa. Tanpa melalui pendidikan seorang anak diyakini tidak akan menjadi sosok manusia utuh (*a fully functioning person*).

Pendidikan diharapkan bisa menjadikan individu dan kelompok masyarakat sebagai warga negara (*members of the nation-state*) yang baik, sadar akan hak dan kewajibannya disatu sisi, serta dapat mempersiapkan individu dan kelompok masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja disisi yang lain (Achmad Dardiri, 2005 dalam Nugroho 2015). Pendidikan merupakan sarana untuk membantu seorang anak untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung agar mampu bermanfaat bagi kehidupannya dimasyarakat. Mengingat sangat pentingnya pendidikan itu bagi kehidupan bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia ini menangani secara langsung masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Tohani (2011) menyatakan pendidikan nonformal melalui pendidikan keterampilan telah menunjukkan kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan.

Tujuan Pendidikan sebagaimana kita ketahui, bahwa pendidikan adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil dari suatu pendidikan tidak segera dapat kita lihat hasilnya atau kita rasakan. Di samping itu hasil akhir dari pendidikan ditentukan pula oleh hasil-hasil dari bagian-bagian dari pendidikan yang sebelumnya. Untuk membawa anak kepada tujuan akhir, maka perlu anak diantar terlebih dahulu kepada tujuan dari bagian-bagian pendidikan.

Dalam hal ini peneliti hanya meneliti pendidikan non formal. Proses pendidikan yang dilangsungkan berguna untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan kepribadian atau tujuan yang lain. Dengan adanya pendidikan maka seseorang akan dapat memperoleh pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Namun pendidikan hendaknya berada pada keluarga, sekolah, dan masyarakat oleh karena ketiga tempat tersebut merupakan dunia seseorang selama perkembangannya. Pendidikan juga bertugas mengajarkan seseorang bagaimana cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak didik untuk belajar terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan keterampilan pada anak didik untuk segera dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat yang berubah secara cepat, mengembangkan daya adaptabilitas yang besar dari diri anak didik. Dengan demikian betapa pentingnya pendidikan untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih lanjut yang dapat menuntun kearah jenjang kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan dirinya.

Dalam konteks ini, tingkat pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan yang baik dapat mengentaskan kemiskinan, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi

modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2004 dalam Nugroho 2015).

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara rasional, empiris dan sistematis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Jumlah populasi 6.445 UMKM di Kabupaten Simalungun. Sesuai dengan penelitian sosial Roscoe dalam (Taniredja dan Mustafidah, 2011) memberikan saran-saran untuk penelitian sebagai berikut :

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Bila sample dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap katagori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi ganda misalnya).Maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 3 (independent + dependent) maka jumlah anggota sampel = $10 \times 3 = 30$.
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok control, jumlah anggota sampel masing – masing antara 10 sampai dengan 20.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka sampel dalam penelitian ini sebesar 40 pelaku UMKM di Kabupaten Simalungun karena variabel penelitian ada 4 (independent + dependent), maka jumlah anggota sampel yaitu $4 \times 10 = 40$ UMKM. Berikut ini pembagian UMKM dengan 40 bidang usaha di 31 Kecamatan Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.1.Pembagian UMKM BerdasarkanBidang Usaha

Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Tepung Mocaf	Bengkel	Panglong
EceranTabung Gas (LPG)	Kilang Padi	Roti Ketawa
Kedai Kopi	Barbershop	Reparasi Mobil
Keripik Ubi	Bakso	Ternak Ayam Pedaging
Kedai Nasi	Cetak Spanduk	Service Komputer
Penjualan Ulos	Foto Copy	Moulding Kayu
Tambal Ban	RumahMakan	Reparasi Perabot Rumah
Sablon Baju	Salon Mobil	The Kemasan
Cetak Plat Kendaraan	Kerajinan Bambu	Cetak Sepatu
Bibit Parfum	Hasil Bumi (Coklat, Sawit, Getahdll)	Cetak Batako
SPBU Mini	Arang Kayu	-
Tukang Jahit Pakaian	Bibit Bunga Anggrek	-
Bibit Ikan	Laundry	-
Stiker Motor	Service Komputer	-
Stempel	-	-
Depot Air Minum	-	-

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk dijawab oleh responden terpilih, dan merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian (Puguh Suharso, 2009). Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian. Pembagian kuesioner adalah sebagai berikut: **Bagian pertama** berisi tentang data diri responden atau keadaan umum responden, **Bagian kedua** berisi tentang perkembangan UMKM, UMKM dalam menyerap tenaga kerja, dan pelatihan/keterampilan pendidikan nonformal dalam mengentaskan Kemiskinan.

Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Arikunto (2010) menyatakan penelitian kuantitatif dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Analisis ini akan dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Data yang dianalisis berupa jawaban-jawaban kuesioner dari para responden yaitu 40 pelaku UMKM di Kabupaten Simalungun.

Pengolahan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan program Excel 2016 untuk pentabulasian data mentah dari lapangan, dan *SPSS Versi 21* untuk analisis regresi data lapangan. Dimana dalam hal ini pengolahan data dimulai dari pentabulasian data hingga mendapatkan deskripsi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Program pengembangan UMKM dan Wirausaha yang disediakan oleh badan-badan negara dan pembangunan dapat membantu untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyebutkan bahwa :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan aset s/d Rp 50 Juta dan Omset maksimum 300 juta per tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan aset > 50 Juta-500 Juta dan omset Rp 300 juta-Rp 2,5 Milyar per tahun.

Dari 40 UMKM yang diteliti, terdapat 10 % UMKM yang membuka usaha dengan modal diatas 500 juta. Sehingga dapat dikatakan 10% UMKM tersebut termasuk usaha dengan skala menengah. Kemudian 60% UMKM yang membuka usaha dengan modal awal sekitar 50 juta-500 juta. Dapat dikatakan bahwa usaha ini merupakan usaha berskala kecil. Sisanya 30% UMKM membuka usaha dengan modal awal dibawah 50 juta yang termasuk kedalam usaha mikro.

Dari tabel diatas, terdapat 40 % UMKM menerima subsidi sebesar lebih dari 50 juta dari pemerintah. Kemudian sebanyak 30% UMKM menerima subsidi dari pemerintah dengan kisaran 30 – 40 juta. Dan 27% dari UMKM tersebut menerima subsidi modal awal dari pemerintah

sebesar 10 juta hingga 20 juta. Namun ada juga usaha yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah yaitu sekitar 3% dari UMKM yang diteliti.

Kemudian sebanyak 45% pengusaha UMKM rata-rata membuka usaha mereka dengan modal dari tabungan mereka sendiri. Ada juga sekitar 35% pengusaha yang membuka usahanya dengan uang warisan yang diterima dari keluarganya. Selebihnya para pengusaha UMKM mendapat dana awal modal usaha dengan melakukan pinjaman ke bank. Untuk lamanya menjadi pengusaha terlihat bahwa 37,5% atau 15 pemilik usaha telah menjadi pengusaha selama lebih dari 10 tahun. Yang paling banyak yaitu 42,5% atau 17 dari pengusaha telah melakukan pekerjaan tersebut selama 6- 10 tahun. Sisanya 20% atau 8 pemilik UMKM menjadi pengusaha selama 1-5 tahun.

Kemudian pengusaha juga menjelaskan lamanya usaha telah berdiri sekitar 37,5% atau 15 responden telah menjalankan usahanya selama lebih dari 10 tahun. Kemudian sebanyak 32,5% atau 13 responden menjalankan usahanya selama 6-10 tahun. Dan sekitar 27,5% atau 11 usaha telah berdiri antara 1-5 tahun, sisanya sebesar 2,5% atau 2 usaha berdiri kurang dari 1 tahun. Dari wawancara yang dilakukan dengan para pengusaha, ternyata para pengusaha berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai swasta, ada yang menjadi buruh, ada yang berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa, dan ada juga yang awalnya tidak memiliki pekerjaan. Mereka menjelaskan beberapa alasan-alasan yang membuat mereka pada akhirnya, memutuskan untuk menjadi pengusaha UMKM. Sebanyak 50% pengusaha UMKM adalah pengusaha yang meneruskan usaha keluarganya sejak dahulu. Karena mereka telah terlatih oleh orang tua mereka, mereka akhirnya menekuni bidang tersebut agar dapat menjadi penerus usaha keluarganya. Sebanyak 30% pengusaha UMKM membuka usaha karena memang mereka berkeinginan membuka usaha dan mereka berbakat (menyukai) bidang usaha tersebut. Adapun sebanyak 20% pengusaha tersebut membuka usaha UMKM karena ingin mencari penghasilan tambahan/sampingan dalam mendukung perekonomian keluarganya.

Sebanyak 65% pengusaha telah menyesuaikan bidang usaha UMKM-nya dengan potensi di daerah yang ada. Kemudian sebesar 35% pengusaha kurang setuju dan tidak setuju bahwa usaha mereka sesuai dengan potensi di daerah yang ada. Dari berdirinya lapangan usaha diatas, sekitar 70% para pengusaha UMKM optimis bahwa produk mereka mampu menjadi produk yang lebih baik dari para pesaing. Karena mereka merasa bahwa setiap produk mereka memiliki ciri khas masing-masing dan pastinya berbeda dari pesaing lainnya. Dan sebanyak 30% pengusaha setuju bahwa kualitas merupakan hal yang berperan penting. Sehingga para pengusaha selalu mengusahakan agar kualitas produk yang mereka tawarkan tetap terjaga. Dalam hal ciri khas produk, sebanyak 45% pengusaha selalu menyesuaikan produk dengan ciri khas yang berbeda dari industri yang lain serta mengatakan bahwa kualitas dapat dijamin. Kemudian sebanyak 27,5% pengusaha tidak selalu membuat produk yang berbeda dengan industri yang lain. Sedangkan sebesar 25% mengatakan jarang membedakan produknya dengan industri yang lain. Sisanya ada 2,5% pengusaha yang selalu membuat produknya dengan ciri yang sama dibanding industri yang lain.

Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Simalungun

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Jumlah unit usaha berhubungan erat dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Di mana banyaknya jumlah unit usaha yang tersedia, maka secara langsung akan menambah jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu industri. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku 15 tahun keatas. Setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Sebanyak 25% responden memiliki tenaga kerja antara 20-99 orang tenaga kerja, usaha ini didominasi oleh usaha menengah. Kemudian sebanyak 35% responden memiliki tenaga kerja antara 5-19 orang, usaha ini didominasi oleh usaha kecil dan sisanya sebesar 40% responden memiliki tenaga kerja antara 1-4 tenaga kerja, dan ini termasuk kedalam usaha mikro. Dari banyaknya tenaga kerja di UMKM tersebut, telah terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang cukup besar setiap tahunnya. Didukung lagi dengan pertumbuhan UMKM semakin berkembang. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 40 pelaku UMKM, terlihat pada skala usaha mikro ada sebanyak 4 UMKM atau 10% yang menyatakan tidak adanya peningkatan tenaga kerja setiap tahunnya karena usaha mereka masih sangat kecil dan masih mampu dikelola sendiri. Usaha mereka diantaranya seperti; Eceran tabung gas (LPG), tambal ban, bibit ikan, dan usaha depot air minum. Kemudian ada 12 UMKM atau 30% yang menyatakan ada jumlah peningkatan tenaga kerja sebanyak 1-4 orang setiap tahunnya. Pada usaha kecil, ada 14 UMKM atau 35% yang menyatakan adanya peningkatan tenaga kerja sebanyak 5-9 orang setiap tahunnya. Selanjutnya, untuk usaha menengah, sebanyak 10 UMKM atau 20% menyatakan adanya peningkatan tenaga kerja lebih dari 10 orang setiap tahunnya.

Saat pertama kali merintis usaha, sebesar 37,5% responden memiliki tenaga kerja sebanyak lebih dari 10 orang. Kemudian sebesar 27,5% responden memiliki tenaga kerja sebanyak 5-9 orang di awal usahanya dan sisanya sebesar 35% memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang. Tenaga kerja yang diserap oleh UMKM sebanyak 42,5% para pekerja dari 40 UMKM tersebut berasal dari keluarga pengusaha UMKM itu sendiri. Kemudian sekitar 32,5% pekerjanya berasal dari sekitar kecamatan dimana UMKM tersebut berdiri. Dan sisanya sebesar 25% pekerja berasal dari luar kecamatan UMKM tersebut berdiri.

UMKM tampak sangat mendukung peningkatan kesejahteraan para tenaga kerjanya. Sebanyak 30% pemilik UMKM selalu mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerjanya. Lalu sebanyak 50% pemilik UMKM sering mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerjanya. Kemudian sebanyak 17,5% pengusaha jarang mendukung peningkatan kesejahteraan para tenaga kerjanya dan sisanya sebanyak 2,5% pemilik usaha tidak pernah mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerjanya. Sebanyak 40% pengusaha mengutarakan bahwa para pekerjanya hanya bekerja sebanyak 4 hari. Para pekerja mampu memenuhi pesanan produk selama 4 hari kerja. Dan sisanya mereka bebas melakukan pekerjaan tambahan apapun diluar pekerjaan mereka sebagai pekerja UMKM. Kemudian sekitar 37,5% UMKM tersebut mempekerjakan para pekerjanya sebanyak 5-7 hari kerja. Layaknya hari kerja normal di perusahaan. Ada juga sekitar 22,5% UMKM yang hanya mempekerjakan pegawainya selama 3 hari dan bahkan dibawah 3 hari. Itu dikarenakan usaha mereka merupakan usaha yang termasuk skala mikro. Sehingga pekerja bergantian dengan pengusaha untuk bekerja di usaha tersebut. Dan ada juga pekerja yang menjadikan ini sebagai pekerjaan sampingan. Jadi mereka hanya cukup menyelesaikan pekerjaan mereka tidak lebih dari 3 hari.

Sebanyak 37,5% tenaga kerja bekerja lebih dari 7 jam dalam seminggu, kemudian 32,5% tenaga kerja bekerja antara 5-6 jam dalam seminggu dan sisanya sebanyak 30% tenaga kerja bekerja antara 2-4 jam dalam seminggu. Para pekerja biasanya diberi upah dengan waktu pembayaran yang berbeda-beda tiap usahanya. Sebanyak 50% pengusaha UMKM membayarkan upah pekerjanya secara harian. Kemudian 30% pengusaha UMKM membayarkan upah pekerjanya secara bulanan. Dan sisanya 20% pengusaha membayar upah pekerjanya secara mingguan. Upah yang diberikan bervariasi oleh setiap perusahaan. Sebanyak 42,5% upah pekerja diatas 2 juta rupiah, sebanyak 30% antara 1 – 2 juta rupiah, dan sisanya 27,5% dibayar sebesar 500 ribu – 1 juta rupiah per bulannya. Selain gaji/upah, para pengusaha juga tidak lupa memberikan bonus bagi pegawai yang rajin dan dapat menyelesaikan target produksi kurang dari waktu yang dibutuhkan. Bonusnya juga bervariasi, pengusaha UMKM sebanyak 45% bonus yang diberikan lebih dari 2 juta perbulannya. Sebesar 37,5% pengusaha memberikan bonus antara 1 – 2 juta perbulannya dan sisanya 17,5% pengusaha memberikan bonus antara 500 ribu – 1 juta perbulannya.

Tingkat Pendidikan Forman dan Non Formal

Pendidikan merupakan sarana untuk membantu seorang anak untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung agar mampu bermanfaat bagi kehidupannya dimasyarakat. Setelah melakukan penelitian lapangan langsung ke 40 UMKM di Kabupaten Simalungun yang merupakan sampel dari penelitian ini. Dari data yang diperoleh di lapangan, sebanyak 42,5% pengusaha sangat setuju bahwa pengembangan usaha didapatkan melalui pendidikan nonformal. Kemudian sebanyak 37,5% pengusaha setuju bahwa pengembangan usaha di dapat melalui pendidikan nonformal. Sisanya sebanyak 20% pengusaha kurang setuju dan tidak setuju dengan keterampilan pengembangan usaha didapatkan melalui pendidikan nonformal.

Sebanyak 45% pengusaha selalu menyelesaikan masalah yang sulit tanpa ditunda pada saat menjalankan usahanya. Keterampilan ini didapat melalui pendidikan nonformal. Kemudian sebanyak 40% pemilik usaha sering menyelesaikan masalah yang sulit dengan pembelajaran yang didapat dari pendidikan nonformal dan sisanya sebanyak 15% jarang menyelesaikan masalah sesuai dengan pendidikan/pelatihan yang mereka dapatkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, sebanyak 25% pengusaha UMKM atau 10 Usaha Menengah menjalani pelatihan lebih dari 5 kali dalam setahun. Kemudian sekitar 35% pengusaha UMKM atau 14 Usaha Kecil yang diteliti juga menjalani pelatihan 4-5 kali dalam setahun. Sebesar 25% pengusaha UMKM atau 10 Usaha Mikro hanya menjalani 2-3 kali pelatihan dalam setahun. Baik pelatihan yang dilaksanakan di dalam daerah maupun diluar daerah dijalani oleh beberapa pengusaha. Pelatihan juga mencakup berbagai bidang keahlian, mengenai produk, pelatihan manajemen usaha, maupun pelatihan seperti cara-cara memperlakukan para pekerja agar lebih senang untuk bekerja. Akan tetapi didalam usaha Mikro ada 15% pengusaha UMKM atau 6 Usaha Mikro yang berdiri tidak menjalani pelatihan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masalah waktu dan keadaan yang terbatas, usaha mereka juga masih kecil dan mereka merasa mampu mengembangkan usaha mereka tanpa mengadakan pelatihan.

Terdapat berbagai bidang keterampilan yang selalu diusahakan para pemilik UMKM dan pemerintah agar diterima oleh tenaga kerjanya. Sebanyak 52,5% pemilik usaha mengatakan bahwa tenaga kerjanya memiliki lebih dari 4 keterampilan yang dikuasai, kemudian sebanyak 30% pemilik usaha mengatakan bahwa tenaga kerjanya memiliki 3 keterampilan yang dikuasai, dan sisanya sebanyak 17,5% pemilik usaha mengatakan bahwa tenaga kerjanya memiliki 2 keterampilan yang dikuasai. 55% dari pemilik usaha mengatakan bahwa pelatihan nonformal selalu meningkatkan produksi UMKM mereka. Kemudian sebanyak 27,5% pemilik usaha sering merasakan bahwa pelatihan nonformal meningkatkan produksi UMKM. Dan sisanya sebanyak 17,5% pemilik usaha mengatakan bahwa pelatihan nonformal jarang meningkatkan produksi UMKM mereka. Dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi sebanyak 50% pemilik usaha selalu merasakan bahwa lingkungan kerja mendukung dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasi dan sebanyak 32,5% pemilik usaha sering melihat bahwa lingkungan kerja mendukung kreatifitas dan inovasi. Sisanya sebanyak 17,5% pemilik usaha jarang jmerasakan bahwa lingkungan pekerjaan mendukung kreatifitas dan inovasi.

Dalam hal motivasi, sebanyak 62,5% pemilik usaha mengatakan bahwa pelatihan/sosialisasi dari pemerintah selalu memberikan motivasi dalam peningkatan UMKM. Kemudian sebanyak 22,5% pemilik usaha mengatakan bahwa pelatihan/sosialisasi dari pemerintah sering memberikan motivasi dalam peningkatan UMKM. Sebanyak 12,5% pemilik usaha mengatakan bahwa pelatihan/sosialisasi dari pemerintah jarang memberikan motivasi dalam peningkatan UMKM. Dan sisanya 2,5% pemilik usaha mengatakan bahwa pelatihan/sosialisasi dari pemerintah tidak pernah memberikan motivasi dalam peningkatan UMKM.

Sebanyak 65% pemilik usaha dan pemerintah kecamatan memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas kerja. Kemudian sebanyak 22,5% pemilik usaha memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerjanya. Lalu, 10% pemilik usaha mengatakan bahwa ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas kerja. Dan sisanya sebanyak 2,5% pemilik usaha mengatakan tidak ada pelatihan.

Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Simalungun:

Menurut para pengusaha, sebanyak 47,5% mengatakan bahwa tenaga kerjanya memiliki kemampuan baca tulis yang sangat baik. Kemudian sebanyak 42,5% para pengusaha mengatakan bahwa tenaga kerjanya memiliki kemampuan baca tulis yang cukup baik. Sisanya sebanyak 10% para pengusaha mengatakan bahwa tenaga kerjanya memiliki kemampuan baca tulis yang kurang baik. Banyak dari para pekerja menuturkan bahwa sebanyak 60% dari mereka lebih mampu untuk tinggal di tempat yang lebih layak dengan lingkungan sosial yang lebih baik setelah mereka bekerja di usaha UMKM tersebut. Lingkungan ekonomi pekerja juga menjadi lebih baik, sekitar 47,5% pengusaha merasa lingkungan ekonomi para pekerja sudah mulai berubah, karena beberapa pekerja mereka memutuskan untuk berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik dibanding sebelumnya.

Untuk tingkat kesehatan, setelah bekerja di UMKM tersebut, Para pekerja mendapatkan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan, Jamkesda, KIS, maupun asuransi swasta lainnya. Rata-rata jaminan kesehatan tersebut didapatkan dari usaha dengan skala menengah. Untuk usaha mikro dan kecil, jaminan kesehatan seperti BPJS masih tidak dapat diberikan oleh para pengusahanya, namun para pekerja sudah mampu untuk mendaftarkan dan membayarkan BPJS mereka setiap bulannya karena mereka sudah memiliki pekerjaan yang cukup untuk membayarkan uang kesehatan mereka setiap bulannya. Sedangkan untuk jaminan kesejahteraan seperti uang pensiun, atau asuransi jiwa, ataupun KPS. Kebanyakan dari pekerja usaha kecil dan menengah biasanya mendapat pesangon ataupun pensiunan jika mereka sudah pensiun ataupun tidak bekerja lagi usaha tersebut. Untuk usaha mikro hal ini masih belum bisa dijamin oleh pemilik usaha tersebut.

Kondisi kesehatan para tenaga kerja sebanyak 62,5% sangat baik. Kemudian sebanyak 35% dari pemilik usaha mengatakan bahwa kondisi kesehatan para tenaga kerjanya cukup baik dan sisanya sebanyak 2,5% menyatakan kurang baik. Selanjutnya diutarakan oleh pemilik usaha, dengan bekerjanya mereka di usaha tersebut, sekitar 60% pekerja mampu mengasah tingkat pengetahuan dan pendidikannya dari lingkungan usaha/pekerjaan yang ia jalani. Dengan kerajinan dan ketekunan mereka dalam bekerja, satu sama lain antar pegawai selalu menyalurkan ilmu-ilmunya untuk menunjang hasil produksi UMKM tersebut. Mengenai lingkungan ekonomi para tenaga kerja, sebanyak 47,5% pemilik usaha mengatakan bahwa lingkungan ekonomi tenaga kerjanya sangat baik. Kemudian sebanyak 40% dari pemilik usaha mengatakan tentang lingkungan ekonomi tenaga kerjanya cukup baik dan sisanya sebanyak 12,5% pemilik usaha mengatakan bahwa lingkungan ekonomi pekerjaanya kurang baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah: Kehadiran UMKM di Kabupaten Simalungun mampu menjadi cara dalam meningkatkan perekonomian yang berdampak terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Simalungun, Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM di Kabupaten Simalungun mampu memberikan perubahan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerjaanya dan Pendidikan Nonformal tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Simalungun. Hal ini terlihat dari hasil penelitian lapangan yang didapat bahwa pendidikan nonformal tidak memberi perubahan apapun bagi kemiskinan jika pelakunya tidak menggunakan pelatihan/keterampilan tersebut dalam kehidupannya. Dan juga beberapa pelaku usaha mengatakan bahwa pelatihan/keterampilan tidak terlalu penting untuk dilakukan.

Saran:

Bagi Pemerintah untuk mendukung keberadaan UMKM agar dapat menyerap Tenaga Kerja dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Namun untuk tingkat pendidikan nonformal tidak hanya dilakukan dengan pelatihan saja, tetapi juga diperlukan adanya pendampingan dan pengawasan dalam pelatihan tersebut agar pelatihan lebih bermanfaat dan berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, Bagi pelaku UMKM dapat memberikan pertimbangan tentang keberadaan para pelaku usaha sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan menjadi penggerak perekonomian di Kabupaten Simalungun.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan karya ilmiah yang relevan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali & Abdel. 2013. Entrepreneurship Development and Poverty Reduction. Somalia : American Internasional Journal of Social Science. Vol. 2 No. 3 Hal 108-113
- Arum. 2016. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Besar dan Sedang. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun. 2016. Kabupaten Simalungun Dalam Angka Tahun 2012-2016. BPS Kabupaten Simalungun
- Mamman, Aminu, dkk. 2015. Small and Medium Sizes Enterprises (SMEs) and Poverty Reduction. Afrika : Cambridge Scholars
- Nugroho, Priyo. 2015. Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Nurjanah, Siti. 2015. Analisis Peran UMKM dalam Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Omolara. 2012. An Appraisal Of the Small and Medium Scale Enterprises On Poverty Alleviation. In Southwestern State Of Osun In Nigeria : OIDA International Journal Of Sustainable Development 05:04. Hal 97-106. ISSN: 1923-6654
- Sokoto, dkk. Strengthening Small and Medium Enterprises (SMEs) as a Strategy for Poverty Reduction. North Western Nigeria : American Journal of Humanities and Social Sciences. Vol 1, No. 3, 2013. Hal. 189-201. DOI : 10.11634/232907811301338
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2011. Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar. Jakarta: Alfabeta
- Tohani, Entoh. 2011. Pendidikan Nonformal dan Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan. Walisongo, Vol. 19, No. 2, November 2011. Hal 385-398